

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, 2006.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Jakarta, 1993.
- _____, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bambang Purnomo, **Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Didin Sudirman, **Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Masruchin Rubai, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP, Malang, 1997.
- Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Poerwo Darminto WJI, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- R. Soesilo, **Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus**, Politea, Bogor, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sanusi Has, **Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)**, Monora, Medan, 1976.

Soegondo, **Sistem Pembinaan NAPI**, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006.

Tanti Yuniar, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Agung Media Mulia, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggara Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia no. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Akses Internet :

<http://wartajatim.blogspot.com>, Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng Bermasalah, 2008. (diakses 24 Desember 2013)

<http://surabaya.tribunnews.com>, Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Bebas, 2011. (diakses 24 Desember 2013)

<http://surabaya.tribunnews.com>, Mantan Sekda Hirup Udara Bebas, 2012. (diakses 24 Desember 2013)

<http://kbbi.web.id/optimal>. (diakses 18 Mei 2013)

<http://kbbi.web.id/upaya>. (diakses 18 Mei 2013)